



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSTYAWATI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 173152

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.524.650.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/318 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 420.750.000
3. Tanah Seluas 8440 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 506.400.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/30 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/21 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 352.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 74.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	66.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	65.757.472
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.730.407.472
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.730.407.472

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.